

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku:

- Abdul Mukthie Fajar, *Hukum Konstitusi dan Mahkamah Konstitusi*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Kostitusi RI, Jakarta, 2006
- , *Partai Politik dalam Perkembangan Sistem Ketatanegaraan Indonesia*, In-TRANS, 2008
- Abdul Rasyid Thalib, *Wewenang Mahkamah Konstitusi dan Implikasinya dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006.
- Ahmad Syahrizal, *Peradilan Konstitusi*, Cet ke-1, Pradnya Paramita, Jakarta, 2006
- Bagir Manan, *Perkembangan Pemikiran dan Pengaturan HAM di Indonesia*, Alumni, Bandung, 2001
- Dede Rosyada dkk, *Demokrasi, HAM dan Masyarakat Madani*, edisi revisi, Tim ICCE UIN Syarif Hidayatullah dan Prenada Media, Jakarta, 2003, hlm. 205-206
- I Dewa Gede Atmadja, *Hukum Konstitusi: Problematika Konstitusi Indonesia Setelah Perubahan UUD 1945*, Edisi Revisi, Setara Press, Malang, 2010,
- Jimly Asshiddiqie, *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*, Serpihan Pemikiran Hukum, Media, dan HAM, Jakarta, 2005
- , *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Sinar Grafika Offset, Jakarta, 2004
- , *Menuju Negara Hukum Yang Demokratis*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, Jakarta, 2008
- , *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Cet-3, RajawaliPers, Jakarta, 2009
- , *Kemerdekaan Berserikat, Pembubaran Partai Politik, dan Mahkamah Konstitusi*, Jakarta, 2006
- Joko J. Prihatmoko, *Mendemokratiskan PEMILU dari Sistem Sampai Elemen Teknis*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2008

- KOMNAS-HAM, *Hak Asasi Manusia: Tanggung jawab Negara, Peran Institusi Nasional dan Masyarakat*, KOMNAS-HAM, Jakarta, 1999
- Mahkamah Konstitusi, *Satu Tahun Mahkamah Konstitusi Mengawal Konstitusi Indonesia*, MKRI, Jakarta, 2004
- Manuarar Siaahaan, *Beberapa Perkembangan Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Dalam Praktek*, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2007
- Miriam Budiardjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2008
- Moh. Mahfud MD, *Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi*, Radja Grafindo Persada, Jakarta, 2010
- , *Pergulatan Potitik dan Hukum di Indonesia*, Gama Media, Jakarta, 1999
- Munir Fuady, *Teori Negara Hukum Modern (Rechtstaat)*, Refika Aditama, 2009
- Ni'matul Huda, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006
- Nurul Huda, *Ilmu Negara*, Rajawali Press, Jakarta, 2010
- Padmo Wahjono, *Indonesia Negara, Berdasarkan Atas Hukum*, Ghalia, Jakarta, 1982
- , *Pembangunan Hukum di Indonesia*, Ind-Hill Co, Jakarta, 1989
- Ridwan HR, *Hukum Adminisrtasi Negara*, Ed.Revisi, Raja Grafindo Persada, 2011
- Satya Arinanto, dkk, *Hukum Hak Asasi Manusia*, Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2008
- , dkk, *Hak Asasi Manusia dalam Transisi Politik di Indonesia*, Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2008
- , *Sejarah HAM Dalam Perspektif Barat, Diseminasi Hak Asasi Manusia Perspektif dan Aksi*, CESDA LP3ES, Jakarta, 2000
- Soehino, *Ilmu Negara*, Cet-V, Liberty, Yogyakarta, 2005
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo, Jakarta, 2001
- Sunaryati Hartono, *Penelitian Hukum Di Indonesia pada Akhir Abad Ke 20*, Alumni. 1994

Soerjono Soekanto, *Beberapa Permasalahan Hukum dalam Kerangka Pembangunan di Indonesia*, Yayasan Penerbit UI, Jakarta, 1975

Taher Azhary, *Negara Hukum*, Kencana Prenda Media Group, Jakarta, 1991

Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, *Filsafat, Teori, dan Ilmu Hukum, : Pemikiran Menuju Masyarakat yang Berkeadilan dan Bermartabat*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2012

Tim Penyusun Cetak Biru Mahkamah Konstitusi, *Cetak Biru Membangun Mahkamah Konstitusi Sebagai Institusi Peradilan Konstitusi yang Modern Dan Terpercaya*, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jakarta, 2004

#### Sumber Lain:

##### A. Jurnal/Artikel

Bagir Manan, “Kedaulatan Rakyat, Hak Asasi Manusia dan Negara Hukum”, dalam *Jurnal Konstitusi PSHK- FH Universitas Islam Indonesia.*, Vol. IV No. 2, November 2011

Indra Perwira, dkk., November 2010, Budaya Konstitusi (Constitutional Culture) Dalam UUD 1945 Perubahan Dikaitkan Dengan Gagasan Perubahan Kelima UUD 1945, dalam *Jurnal Konstitusi Volume II Nomor 2, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*, Jakarta 2010

Putu Eva Ditayani Antari, “Kewenangan Pembubaran Partai Politik Oleh Mahkamah Konstitusi Ditinjau Dari Perspektif Hak Asasi Manusia (HAM)”, *Jurnal Magister Hukum Vol.7 No.3 2014*

R. Herlambang Perdana Wiratraman, “Konstitusionalisme dan Hak Asasi Manusia: Konsepsi Tanggung Jawab Negara dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia”, *Jurnal Hukum Yuridika Fakultas Hukum Universitas Airlangga*, Vol. 20 No. 1, Januari-Februari 2005

Widayati, “Pembubaran Partai Politik Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia” *Jurnal Hukum Vol XXVI, No. 2, Agustus 2011*

## B. Skripsi/Tesis/Disertasi

Muchamad Ali Safa'at, "*Pembubaran Partai Politik Di Indonesia (Alnalisis Pengaturan Hukum dan Praktik Pembubaran Partai Politik 1959 – 2004)*", Disertasi, Universitas Indonesia, Jakarta, 2009

Rukmana Amanwinata, "*Pengaturan Dan Batas Implementasi Kemerdekaan Berserikat Dan Berkumpul Dalam Pasal 28 UUD 1945*", Disertasi, Universitas Padjajaran, Bandung, 1996

## C. Internet

[http://www.komnasham.go.id/portal/files/ES\\_InstrumenPokokHAMdiIndonesia.pdf](http://www.komnasham.go.id/portal/files/ES_InstrumenPokokHAMdiIndonesia.pdf)

<http://sekitarkita.com/2009/06/deklarasi-universal-hak-asasi-manusia>

## D. Peraturan Perundang-undangan

### (a). Instrumen Internasional

*Universal Declaration of Human Rights (DUHAM)*

*International Covenant on Civil And Political Rights (ICCPR)*

*International Covenant on Economic Social and Cultural Rights (ICESCR)*

### (b). Instrumen Nasional

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (LNRI Tahun 1999 No. 165, Tambahan LNRINo. 3886).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (LNRI Tahun 2003 No. 98, Tambahan LNRI No. 4316).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (LNRI Tahun 2008 No. 2, Tambahan LNRI No. 4801).

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik LNRI Tahun 2011 No.8, Tambahan LNRI No.5189).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (LNRI Tahun 2011 No. 70, Tambahan LNRI No. 5226).

Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) Nomor 12 Tahun 2008 tentang tentang Prosedur Beracara dalam Pembubaran Partai Politik.

